Ekonom Desak Pemerintah Perketat Regulasi Aset Kripto

Tanggal	: Kamis , 24 Juni 2021
Media	: CNNIndonesia.com
Halaman	: -
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Iman Sugema *(Pengamat Ekonomi)*, Nur Komaria *(Peneliti INDEF)*, Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi Bisnis
Topik	: Kripto

Ekonom Desak Pemerintah Perketat Regulasi Aset Kripto

CNN Indonesia | Kamis, 24/06/2021 17:25 WIB



Indef mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi aset kripto agar tak menimbulkan gangguan pada perekonomian. (Istockphoto/jpgfactory).

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi aset kripto. Pasalnya, pertumbuhan aset kripto tanpa disertai dengan regulasi yang memadai bisa menimbulkan gangguan pada perekonomian.

Ekonom Senior Indef Iman Sugema menuturkan saat ini regulasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih cenderung bersifat akomodatif saja, belum pada pengaturan ketat.

"Ini harus menjadi *concern* terbesar dari para *policy maker* (pembuat kebijakan) untuk segera keluarkan aturan yang jauh lebih ketat tentang *cryptocurrency* (mata uang kripto), seperti bitcoin dan kawan-kawannya," ujarnya dalam diskusi bertajuk Plus-Minus Investasi Aset Kripto, Kamis (26/4).

Baca juga: China Larang Uang Kripto, Bitcoin Anjlok ke Bawah US$30 Ribu

Ia menuturkan investasi pada aset kripto bersifat spekulatif sehingga memiliki fluktuasi yang sangat tajam. Kondisi ini berbeda dengan investasi pada sektor riil yang lebih memiliki nilai tambah serta tidak bersifat spekulatif.

"Cryptocurrency tidak ada hubungan dengan penciptaan nilai tambah," ujarnya.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk berkaca pada sejumlah negara yang telah melahirkan aturan main ketat bagi uang kripto, salah satunya China. Seperti diketahui, Presiden Xi Jinping sangat keras dengan perdagangan kripto mulai dari melarang transaksi menggunakan uang kripto, melarang penambangan uang kripto, hingga melarang lembaga jasa keuangan melayani mata uang kripto.

"Langkah yang dilakukan Pemerintah China ini perlu kita pelajari seksama, bukan berarti kita meng-copy tapi kita ingin ke depankan apapun yang terjadi di aset kripto itu selayaknya didesain untuk menciptakan keuntungan buat negara atau kepentingan masyarakat. Artinya, aspek spekulasi kemudian menjadi tereduksi," imbuhnya.

Baca juga: Harga Bitcoin Tersungkur Gegara Larangan Keras China

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nur Komaria mendorong pemerintah segera merealisasikan bursa perdagangan aset kripto. Dengan menjadikannya legal, maka pengawasan dan penindakan oleh regulator pun menjadi lebih mudah.

"Sebaiknya pemerintah perlu mempercepat pembentukan bursa kripto sehingga menjadi legalitas uang kripto untuk diperdagangkan," katanya.

Selain itu, ia mendorong Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan perlindungan kepada pengguna. Untuk perlindungan konsumen, ia juga memandang perlunya percepatan pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, BI dan OJK hendaknya memperketat aturan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

"Mengingat aset kripto ini banyak ditengari untuk *money laundry* dan kemudian mendanai terorisme," ujarnya.

Baca juga: Bank di Spanyol Buka Layanan Penjualan Bitcoin

Sebelumnya, Bappebti menargetkan Indonesia bakal memiliki bursa berjangka aset kripto paling lambat akhir tahun ini. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyebut bursa kripto dibuat untuk mengakomodasi minat investasi aset kripto investor Indonesia yang sedang naik daun.

"Bursa sedang dalam proses, target kami dari Bappebti paling lambat akhir 2021 sudah ada bursanya dan sudah berjalan," kata dia pada pada webinar Kompas bertajuk Mengelola Demam Aset Kripto - Perlindungan Investor di Perdagangan Aset Kripto.

Sedangkan, fasilitas penunjang lainnya seperti sistem kliring dan nomor identifikasi investor atau single investor identification (SID) seperti di bursa akan menyusul setelah busa dibentuk.